



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Juni 2018/Periodik - 2017)

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI

UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, PENGELOLAAN
SUB UNIT KERJA :

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HELMI KASIM

2. Jabatan : **PENELITI MUDA**

3. NHK : **136536**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 250.000.000

 Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/36 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 16.500.000

1. MOTOR, YAMAHA VEGA SEPEDA MOTOR Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000

2. MOTOR, --- SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.

15.000.000

C.	HARTA BERGERAK LAINNYA			Rp.	12.950.000	
D.	SURAT BERHARGA	Nh.	Nh.	Rp.	W	
E.	KAS DAN SETARA KAS	K	K	Rp.	169.500.000	
F.	HARTA LAINNYA	-1	-1	Rp.		
PI	Sub Total	KPI	KPIK	Rp.	448.950.000	
III. HUTANG				Rp.	120.000.000	ſ
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)		WOK-	WOK.	Rp.	328.950 <mark>.00</mark> 0	

Catatan:

- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-





Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

- 3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **TIDAK LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **29 Januari 2019**.
- 4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

